

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DI KOTA PALEMBANG**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Sains (M.Si)
Pada
Program Studi Magister Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**

oleh:

**ANNISA LARASATI CHAIRANI
NIM. 07012622125066**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Palembang
Nama Mahasiswa : Annisa Larasati Chairani
NIM : 07012622125066
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik

Menyetujui,



Prof. Dr. Slamet Widodo, MS., M.M
Pembimbing Pertama



Prof. Dr. Sriati, M.S
Pembimbing Kedua

Mengetahui,

Koordinator Program Studi
Magister Administrasi Publik



Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.
NIP. 19780512 200212 1 003

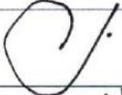
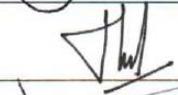
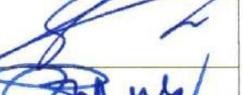


Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 19660122 199003 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Tesis : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)
di Kota Palembang
Nama Mahasiswa : Annisa Larasati Chairani
NIM : 07012622125066
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik
Tanggal Ujian : 14 Maret 2023

NO.	NAMA DOSEN	TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. Slamet Widodo, MS., M.M	Ketua	
2	Prof. Dr. Sriati, M.S	Sekretaris	
3	Dr. Andries Lionardo, M.Si	Anggota	
4	Dr. Sena Putra Prabujaya, M.AP.	Anggota	
5	Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si	Anggota	

Palembang, Maret 2023
Menyetujui,
Koordinator Program Studi
Magister Administrasi Publik


Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.
NIP. 19780512 200212 1 003

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Larasati Chairani
NIM : 07012622125066
Tempat / Tanggal lahir : Palembang / 20 Juli 1998
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik
Judul Tesis : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikia

n pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, Maret 2023
Yang Menyatakan,



Annisa Larasati Chairani

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Larasati Chairani
NIM : 07012622125066
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Administrasi Publik. **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non exclusive Royalty - Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KOTA PALEMBANG”
berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Administrasi Publik berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Palembang
Pada Tanggal : Maret 2023
Yang Menyatakan,



Annisa Larasati Chairani

BAB I

PENDAHULUAN

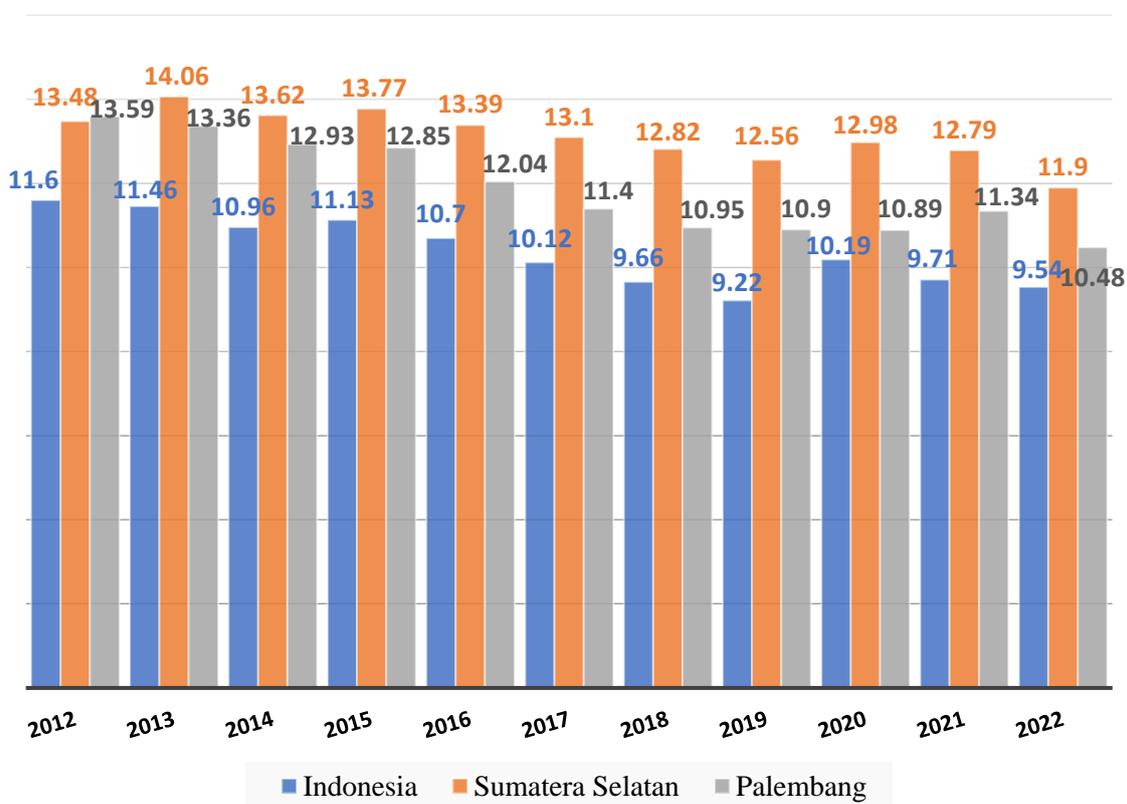
1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini menjadi tantangan terbesar di berbagai negara di dunia termasuk untuk negara Indonesia sendiri. Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk yang mencapai 273,87 juta penduduk dengan jumlah penduduk miskin yang mencapai 26,5 juta penduduk miskin atau 9,7 persen penduduk Indonesia yang tercatat sebagai penduduk miskin (Badan Pusat Statistik, 2021). Tingginya jumlah penduduk yang dan penduduk miskin yang ada di Indonesia menjadikan salah satu faktor bagi pemerintah Indonesia mengalami kesulitan untuk menekan jumlah penduduk miskin yang saat ini. Kementerian Sosial mendefinisikan kemiskinan merupakan keadaan sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Seseorang dapat digolongkan sebagai penduduk miskin disebabkan oleh beberapa faktor, (Hartomo & Aziz, 1997) menjelaskan penyebab dari kemiskinan yaitu taraf pendidikan yang rendah, sikap malas, keterbatasan sumber alam, lapangan kerja yang terbatas, kesulitan modal, dan beban dari keluarga. (Kuncoro & Hardani, 2003) menjelaskan kemiskinan disebabkan oleh ketimpangan distribusi pendapatan yang disebabkan oleh perbedaan pola pikir terhadap kepemilikan sumber daya, kualitas SDM yang rendah, serta ketimpangan dalam akses berbagai bidang dan modal.

Palembang merupakan kota terpadat dan terbesar kedua di Sumatera, dengan jumlah penduduk yang mencapai 1,686 juta penduduk tercatat ada 11,34 %

persen penduduk miskinnya. Seorang dapat dikategorikan miskin apabila berada diambang atau di bawah garis kemiskinan, di tingkat nasional garis kemiskinan sebesar Rp 486.168 per kapita per bulan. Untuk di tingkat provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 457,455.00 per bulan, sedangkan untuk di Palembang sebesar Rp 567,518.00 per bulan. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan perbandingan persentase penduduk miskin di Indonesia, Sumatera Selatan dan Palembang yang dapat dilihat dari grafik ini.

PERBANDINGAN PENDUDUK MISKIN INDONESIA, SUMSEL, PALEMBANG (PERSEN)



Gambar 1. 1 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia, Sumatera Selatan, dan Palembang

Sumber: Diolah dari data BPS

Grafik di atas merupakan perbandingan dari persentase penduduk miskin di Indonesia, Sumatera Selatan, dan Palembang yang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada pada wilayah tersebut. Berikut merupakan tabel yang

menunjukkan jumlah dari persentase penduduk miskin yang ada di Indonesia, Sumatera Selatan, dan Palembang terhadap jumlah penduduknya.

Tabel 1. 1 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia, Sumatera Selatan, dan Palembang

No	Tahun	Indonesia (Juta)	Sumatera Selatan (Juta)	Palembang (Ribu Jiwa)
1	2012	28,71	1,042	206,49
2	2013	28,6	1,108	205,99
3	2014	27,73	1,085	202,31
4	2015	28,51	1,112	203,12
5	2016	27,76	1,096	191,95
6	2017	26,58	1,086	184,41
7	2018	25,67	1,076	179,32
8	2019	24,78	1,067	180,67
9	2020	27,55	1,119	182,61
10	2021	26,50	1,116	194,12
11	2022	26,16	1,044	181,65

Sumber: Diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel di atas menunjukkan perbandingan jumlah penduduk miskin sejak tahun 2011 sampai 2022 yang ada di Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang yang menunjukkan jumlah miskin yang tergolong cukup tinggi. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa diperlukannya sebuah kebijakan yang saling melengkapi dan mampu mendukung satu sama lain, sehingga kemiskinan dapat berkurang dan kesejahteraan dapat dirasakan para seluruh masyarakat. (Todaro, 2003) menjelaskan dalam mengatasi masalah kemiskinan perlu dirancang kebijakan yang mampu menghapuskan distorsi harga faktor, kebijakan yang mampu memperbaiki struktural, kebijakan yang mampu memperbaiki distribusi pendapatan antara golongan, dan kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan kualitas teknologi yang dapat mengembangkan berbagai sektor.

PKH diimplementasikan untuk mendukung kebijakan pada bidang perlindungan sosial bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Tujuan dilaksanakan program ini guna melindungi penduduk yang tergolong miskin sehingga mereka dapat menikmati kelayakan dalam hidup mereka. Program ini diharapkan dalam jangka pendek dapat mengurangi beban RTSM dan untuk jangka panjang diharapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan yang ada

antar generasi sehingga generasi berikutnya tidak mengalami kemiskinan. PKH merupakan salah satu bagian dari instrumen penanggulangan kemiskinan yang dibagi berdasarkan klaster yaitu: Klaster I (Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga), Klaster II (Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat), dan Klaster III (Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil). PKH merupakan bagian dari Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga (Klaster I) yang merupakan program bantuan sosial bersyarat yang dilaksanakan untuk memberikan akses pada keluarga miskin untuk memanfaatkan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Pada Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menjelaskan bahwa PKH merupakan program yang dilaksanakan dengan pemberian bantuan sosial bersyarat kepada penduduk miskin yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang. Kehadiran PKH diharapkan dapat mengatasi angka kemiskinan yang tinggi dan memutus rantai kemiskinan dalam keluarga; meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin; dan meningkatkan kesejahteraan kelompok paling miskin. PKH merupakan wujud pelaksanaan dari UU No. 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin, dimana penduduk miskin di Indonesia memiliki hak untuk memperoleh kebutuhan pokok; memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial; memperoleh kehidupan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat; mampu meningkatkan kesejahteraan; serta memiliki kesempatan kerja dan usaha.

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang harus ditangani dengan usaha yang maksimal agar masyarakat Indonesia dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mereka mampu melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. Melihat keadaan dari sebagian penduduk Indonesia yang belum memiliki kehidupan yang layak serta ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga menjadi kewajiban bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial,

pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Peningkatan jumlah penduduk miskin di Palembang yang telah terjadi dimulai pada 2018 sampai 2021 ini menunjukkan bahwa perlu usaha lebih bagi pemerintah untuk menekan angka tersebut. Kota Palembang merupakan sebuah kota yang memiliki penduduk yang banyak dengan jumlah 1,686 juta penduduk dan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di antara kota/kabupaten se-Sumatera Selatan. Berikut tabel yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk miskin di Kota Palembang dibandingkan dengan kota/kabupaten di Sumatera Selatan.

Tabel 1. 2 Perbandingan Penduduk Miskin Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan

Kota/Kabupaten	Persentase (%)		Jumlah (Ribuan Orang)	
	2020	2021	2020	2021
Ogan Komering Ulu	12,75	12,62	47,30	47,50
Ogan Komering Ilir	14,73	14,68	123,34	124,78
Muara Enim	12,32	12,32	79,27	80,40
Lahat	15,95	16,46	65,75	68,40
Musi Rawas	13,50	13,89	54,95	57,46
Musi Banyuasin	16,13	15,84	105,38	105,23
Banyu Asin	11,17	10,75	96,27	94,08
Ogan Komering Ulu Selatan	10,85	11,12	39,50	41,23
Ogan Komering Ulu Timur	10,43	10,60	71,10	72,89
Ogan Ilir	13,36	13,82	123,34	124,78
Empat Lawang	12,63	13,35	31,89	34,11
Penukal Abab Lematang Ilir	12,62	12,91	24,17	25,10
Musi Rawas Utara	19,47	20,11	37,75	39,50
Kota Palembang	10,89	11,34	182,61	194,12
Kota Prabumulih	11,59	12,20	21,83	23,60
Kota Pagar Alam	9,07	9,40	12,71	13,27
Kota Lubuklinggau	12,71	13,23	29,80	31,61

Sumber: Diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS)

Pada dua tahun terakhir periode tahun 2020–2021 Kota Palembang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Sumatera Selatan dengan jumlahnya yang mengalami peningkatan juga, maka melalui PKH yang

merupakan salah satu dari berbagai program yang memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan serta beberapa program yang mendukung dalam mengatasi kemiskinan seperti Program Indonesia Pintar (PIP); Program Indonesia Sehat (PIS); Beras Sejahtera (Rastra) atau Bantuan Sosial Pangan; Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); Dana Desa; serta Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Pelaksanaan berbagai program tersebut diharapkan dapat dilakukan secara baik sehingga *output* dari program tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan dapat menekan jumlah penduduk miskin di Kota Palembang. Kehadiran PKH merupakan salah satu usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palembang dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya dan ada penurunan jumlah penduduk miskin di Kota Palembang.

Melihat fenomena mengenai kemiskinan yang terjadi di Kota besar seperti di Palembang, perlu dilihat kembali sejauh mana sebuah kebijakan mampu mengatasi sebuah permasalahan. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program yang hadir untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menekan angka kemiskinan, dan membantu penduduk miskin agar dapat kelayakan hidup mereka. Implementasikan PKH di Kota Palembang diharapkan mampu mengatasi permasalahan tingkat angka kemiskinan yang tinggi; meningkatkan taraf hidup dari penerima manfaat; mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan; merubah perilaku dan kemandirian; dan dalam jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan pada keluarga miskin. Namun pada kenyataannya permasalahan yang ditemukan dilapangan terkait pelaksanaan PKH di Kota Palembang masih cukup serius seperti angka kemiskinan di Kota Palembang yang naik sejak tahun 2018 hingga 2021, pemanfaatan bantuan yang tidak sesuai, dan tingkat kepatuhan KPM yang masih rendah pada pelaksanaan PKH di Kota Palembang. Beberapa permasalahan tersebut yang mendasari dilakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Palembang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang ada pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan di Kota Palembang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Program Keluarga Harapan di Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan di Kota Palembang.
2. Untuk menganalisis faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dari implementasi Program Keluarga Harapan di Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulisan pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat berkontribusi dalam perkembangan kajian Ilmu Administrasi Publik, terutama dalam pengembangan konsep dari implementasi kebijakan publik yang dilihat dari Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Palembang,

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pihak yang terkait dengan implementasi Program Keluarga Harapan di Kota Palembang (PKH) dalam hal ini Dinas Sosial Kota Palembang, Pemerintah Kota Palembang, serta berbagai pihak yang ikut terlibat dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul, C., Wirasasmita, R. A., & Hasan, S. (1999). *Evaluasi Proyek*. Pionir Jaya.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Alfatih, A. (2010). *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Unpad Press.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta 2010.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2021. *Badan Pusat Statistik*.
- Dwijowijoto, R. (2003). *Kebijakan publik: Formulasi implementasi dan evaluasi*. PT Elek Media Kompotindo.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hartomo, & Aziz, A. (1997). *Ilmu Sosial Dasar*. Bumi Aksara.
- Haughton, J., & Khandker, S. (2012). *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan: Handbook on Poverty and Inequality*. Salemba Empat.
- Jones, G. (2004). *Organizational Theory, Design and Change text and cases*. Pearson Education Inc.
- Kuncoro, M., & Hardani, W. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga.
- Madani, M. (2011). *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu.
- Maipita, I. (2013). *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*. Absolute Media.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Prastyawan, A., & Lestari, Y. (2020). *Pengambilan Keputusan*. Unnesa University Press.
- Setiawan, G. (2004). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Remaja Rosdakarya Offset.
- Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2007). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.

- Sujianto. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*. Alaf Riau.
- Supriatna, T. (1997). *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Humaniora Utama Press (HUP).
- Taufiqurokhman. (2004). *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara kepada Presiden selaku Penyelenggara Pemerintahan*. FISIP Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Tjokroamidjojo, B. (2006). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES.
- Todaro, M. (2003). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Ghalia Indonesia.
- Wahab, S. (2005). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.

TESIS

- Judding, K. (2020). *Program Keluarga Harapan dalam Pembentukan Keluarga Sejahtera Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Ponjalae Kecamatan Wara Timur Kota Palopo*. Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo.
- Kaharuddin. (2020). *Penggunaan Media Komunikasi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Family Development Session (Fds) Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Penerima Manfaat di Samasundu Kabupaten Polewali Mandar*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
- Rizana, D. (2017). *Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial PPKB Kabupaten Kebumen*. STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
- Sahib, M. (2016). *Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Universitas Islam Negeri Alauddin.

JURNAL

- Claudia, A., & Fachrudin, A. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Bojong Sari Kota Depok. *Jurnal Otonomi Daerah Dan Pengembangan Masyarakat*, 15(2).
- Fadhliazis, F., & Sarjono, S. (2019). Analisis dan Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan dengan Simple Additive Weighting (SAW) Pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 126. <https://doi.org/10.33998/jurnalmanajemensisteminformasi.2019.4.2.617>

- Fitriani, E. (2020). Perbandingan Algoritma C4.5 dan Naïve Bayes Untuk Menentukan Kelayakan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan. *SISTEMASI*, 9(1), 103. <https://doi.org/10.32520/stmsi.v9i1.596>
- Herlina, H., Warjio, W., & Siregar, S. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 153–161. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.55>
- Husaini, & Yuswardi. (2020). Pemanfaatan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Untuk Penentuan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Pidie. *Jurnal Real Riset*, 2(2), 2.
- Infitah, N., Sukidin, S., & Hartanto, W. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sumber Kejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 13(2), 103. <https://doi.org/10.19184/jpe.v13i2.11346>
- Kholif, K., Noor, I., & Siswidiyanto. (2014). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 709–714.
- Najidah, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal Of Public Policy and Management Review*, 8(2).
- Purba, B., & Primayoga, K. (2017). Pengaruh Motivasi Dan Kohesivitas Kelompok Terhadap Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, 3(2).
- Purwanto, S. A., Sumartono, & Makmur, M. (2013). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). *WACANA, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 16(2).
- Rahmawati, E., & Kisworo, B. (2017). Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 1(2). <https://doi.org/10.15294/pls.v1i2.16271>
- Restianti, A. (2018). Evaluasi Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 1(2), 423. <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.012-10>
- Sari, W., & Nadjib, M. (2019). Determinan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada Penerima Program Keluarga Harapan. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.7454/eki.v4i1.3087>

- Sasmito, C., & Nawangsari, E. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu. *Journal of Public Sector Innovations*, 3(2).
- Utomo, D., Hakim, A., & Ribawanto, H. (2014). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(1), 29–34.
- Yuni Aliyatul Rohmah. (2015). Analisis Akuntabilitas Program Keluarga Harapan (Studi Deskriptif Akuntabilitas Administratif Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Kecamatan Semampir Surabaya). *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 1–9. <https://doi.org/10.30649/aamama.v18i1.27>

PERATURAN

- Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan*. Jakarta.
- Indonesia. 2009. *Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. Jakarta.
- Indonesia. 2011. *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin*. Jakarta.

INTERNET

- Website resmi Kementerian Sosial. <https://kemensos.go.id/>. Diakses pada 19 September 2022.
- Website resmi BPS. <https://www.bps.go.id/>. Diakses pada 19 September 2022.

